



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201986027, 4 Desember 2019

Pencipta

Nama : **Sarmini, Warsono,**
Alamat : Mojopurno, Magetan, Jawa Timur, 60234
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM Unesa**
Alamat : Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, 60213
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Membangun Nasionalisme Generasi Muda**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 30 Agustus 2019, di Surabaya

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000167873

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Sarmini	Mojopurno
2	Warsono	Lidah Wetan



BAB I

Nasionalisme di Meja Diskusi

A. Pengertian Nasionalisme di Meja Diskusi

Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara (Renan, 1990). Sikap secara fundamental timbul dari adanya nasional dalam bentuk formalisasi dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Dan kesadaran nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu negara nasional (Kohn, 1984). Senada dengan Sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa (Stoddard, 1966). Nasionalisme merupakan hasil dari perpaduan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual (Sneyder, 1954).

Nasionalisme dalam perpektif konsep dan paham diasumsikan bahwa nasionalisme merupakan suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada Negara (Syamsudin, 1988).



Gambar1. Semangat berdiskusi nasionalisme
Sumber: pramukapos.com

Nasionalisme berupa suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada Negara kebangsaan (Kohn, 1984). Nasionalisme memuat tentang kesatuan (*unity*), kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), demokrasi, kepribadian nasional serta prestasi kolektif (Kartodirjo, 1999).

Nasionalisme dalam konteks budaya didefinisikan lebih mengacu pada fenomena budaya daripada fenomena politik, karena ia berakar pada etnisitas dan budaya postmodern. Walaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan (Hutchinson, 2005). Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa.

Beragam definisi nasionalisme menurut para ahli kebangsaan, yang pada intinya mengarah pada sebuah konsep mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu di antara masyarakat dunia. Konsep nasionalisme juga sering dikaitkan dengan kegiatan politik karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara.

Secara umum dapat dipertegas bahwa nasionalisme merupakan suatu paham kesadaran untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa karena adanya kebersamaan kepentingan, rasa senasib sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu dan masa kini serta kesamaan pandangan, harapan dan tujuan dalam merumuskan cita-cita masa depan bangsa. Untuk mewujudkan kesadaran tersebut dibutuhkan semangat patriot dan perikemanusiaan yang tinggi, serta demokratisasi dan kebebasan berfikir sehingga akan mampu menumbuhkan semangat persatuan dalam masyarakat pluralis.

Substansi Nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur: *Pertama*, kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, etnik, dan agama. *Kedua*,

kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan dari bumi Indonesia.

Wujud nasionalisme dari paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan bangsa akan dapat dihindarkan.

Nasionalisme dapat dibangun atas empat unsur, yaitu: (1) Hasrat untuk mencapai kesatuan; (2) Hasrat untuk mencapai kemerdekaan; (3) Hasrat untuk mencapai keadilan; dan (4) Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Empat unsur ini dapat didefinisikan nasionalisme berarti: (1) Memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan; (2) Memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan; (3) Memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama; (4) Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah; dan (5) Terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum (Kaelan, 2013).

Makna nasionalisme dari perspektif politik

nasional merupakan manifestasi kesadaran



Gambar 2. Merumuskan Persiapan Kemerdekaan
Sumber: republika.co.id

mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Sebagai warga negara merasa bangga dan mencintai negaranya kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara tidak berarti merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Semangat nasionalisme yang tinggi mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain (Budimansyah, 2010).

Pada prinsipnya nasionalisme Indonesia merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa (Lan dan Manan, 2011).

Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa tidak semena-mena terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan dan menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama.

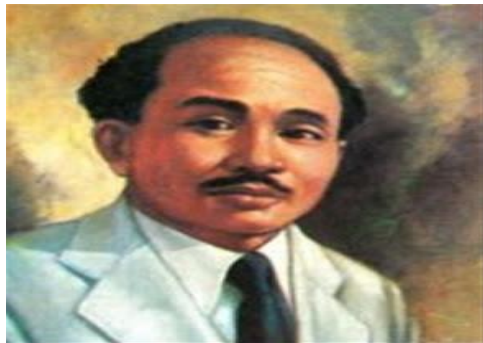
B. Pentingnya Nasionalisme di Bumi Pertiwi

Nasionalisme menonjol sejak revolusi Perancis, sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan imperium Barat yang berhasil meluaskan penetrasi kekuasaannya ke berbagai belahan bumi. Dengan slogan “*liberte, egalite, fraternite*”, nasionalisme menjadi ideologi baru yang sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi, dikarenakan tanpa sebuah negara nasional demokrasi akan sulit terwujud (Heater, 2004).

Nasionalisme dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang dilakukan kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia.

Abad ke 19 dan ke 20 yang dijuluki sebagai abad ideologi merupakan masa yang penuh dengan benturan sosial yang meliputi hampir seluruh belahan dunia. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia menggulirkan pemahaman-pemahaman dan kesepakatan-kesepakatan yang mengarah pada tata dunia baru (Kohn, 1971). Gagasan mengenai hak setiap bangsa untuk dapat menentukan nasib sendiri yang terjadi di berbagai belahan dunia disertai perasaan yang kuat untuk melepaskan diri dari penindasan yang dialami, mengantarkan masyarakat yang mendiami pulau-pulau yang terpisah untuk bersatu, bergabung memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang berjuang menegakkan kedaulatannya

Tonggak sejarah yang terpenting dalam proses nasionalisme di Indonesia adalah ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, diikuti ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang mengilhami lahirnya konsep bertanah air



Gambar 3. Dr. Sutomo Pelopor Budi Utomo
Sumber: portalsejarah.com

Indonesia, berbangsa
Indonesia dan berbahasa
Indonesia. Proses

nasionalisme tersebut berlanjut dan melandasi perjuangan-perjuangan berikutnya hingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah melalui proses yang sangat panjang

dan berat. Keberhasilan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan melalui perjuangannya sendiri juga melahirkan pengakuan dunia bahwa nasionalisme Indonesia termasuk salah satu yang terkuat karena hanya sedikit negara dari dunia ketiga yang mampu merdeka melalui proses revolusi (Sukarno, 2005)¹.

Kentalnya kaitan nasionalisme dengan perjuangan melawan penjajah pada masa tersebut turut menyebabkan keterbatasan pemahaman definisi nasionalisme. Ungkapan



Gambar 4. Motivasi nasionalisme berjuang
Sumber: portalsejarah.com

“hidup atau mati” atau “*right or wrong is my country*” yang dahulu

lantang diucapkan oleh para pejuang kemerdekaan, menjadi hal yang semu dan kurang tepat dialamatkan pada generasi muda saat ini. Pergeseran makna dari nasionalisme itu sendiri tidak jarang menyebabkan penilaian negatif terhadap semangat nasionalisme generasi muda saat ini (Suhartono, 1994).²

Lepasnya Timor Timur menjadi negara baru Timor Leste di penghujung tahun 1999, serta keputusan menyerahkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan kepada Malaysia akhir tahun 2002 silam menjadi ujian nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Kerawanan disintegrasi dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, dirasakan semakin menguat di berbagai daerah, antara lain Aceh, Ambon, Papua dan Riau yang menyebabkan munculnya konflik-konflik sosial dalam masyarakat, terutama benturan antara penduduk asli pribumi dan penduduk pendatang (Hamid, 2004).³

Sebagian besar etnik dari suatu negara untuk melepaskan diri dari negara induk, antara lain karena perlakuan pemerintah pusat yang

dirasakan tidak adil dan perasaan tertekan terus menerus karena diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Keinginan disintegrasi dari berbagai daerah di Indonesia merupakan akumulasi dari ketidakpuasan identitas nasional yang dipaksakan selama ini. Sindhunata menambahkan bahwa nasionalisme di Indonesia telah mati karena ulah para penguasa yang berniat melanggengkan kekuasaannya (Mandatory, 2005).⁴ Bukti dari kelemahan berbangsa di Indonesia adalah homogenitas yang terjadi di tingkat lokal, padahal di tingkat lokal itu kebangsaan Indonesia sangat heterogen sehingga muncul keresahan dan kegelisahan masyarakat di tingkat lokal untuk mencari dan menemukan identitasnya masing-masing yang telah lama dikebiri.

C. Menumbuhkembangkan Nasionalisme Generasi

1. Membangun Nilai Sejarah

Menumbuhkan nasionalisme sampai pada taraf wujud perilaku harus ditumbuhkan kesadaran sejarah sebagai orientasi intelektual, suatu sikap jiwa yang perlu memahami secara tepat faham kepribadian nasional. Kesadaran sejarah ini menuntun manusia pada pengertian mengenal diri sendiri sebagai bangsa, kepada *self-understanding of nation*, kepada sangkan paran suatu bangsa, kepada persoalan *what we are, what we are what we are* (Soedjatmoko, 1984)⁵ Dengan demikian, kesadaran sejarah merupakan kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakekat sejarah bagi masa kini dan bagi masa yang akan datang, menyadari



Gambar 5. Perjuangan merebut kemerdekaan
Sumber: portalsejarah.com

dasar pokok bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses pendidikan.

Mengembangkan manusia Indonesia sadar sejarah membutuhkan motivasi yang kuat sebagai faktor penggerak dari dalam diri manusia sendiri. Nilai-nilai nasionalisme dihubungkan dengan sejarah, merupakan nilai-nilai masa lampau yang telah teruji. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai nasionalisme secara umum berpengaruh juga terhadap pola perilaku masyarakat. Nilai-nilai nasionalisme pada dasarnya bersumber pada nilai-nilai Pancasila, Praktiknya pola perilaku masyarakat Indonesia masih belum mencerminkan nilai-nilai nasionalisme seperti yang diharapkan. Kenyataan ini bertolak belakang dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan tercermin dalam butir-butir pengamalan Pancasila (Yaqin, 2005).⁶

Berdasarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, maka untuk mengisi dan meneruskan kemerdekaan saat ini, sangat diperlukan jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi dari tiap-tiap warga negara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan usaha yang keras dan serius, dan untuk mewujudkannya tidaklah harus selalu tampak di mata orang lain, akan tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana sampai pada hal-hal yang kompleks. Contoh sederhana penerapan nasionalisme dalam dunia pendidikan antara lain: (1) keikutsertaan para peserta didik dalam mengikuti upacara bendera, (2) kesadaran para peserta didik pada saat penghormatan bendera, dan (3) kesadaran para peserta didik dalam mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku (Sapriya, 2012).⁷

2. Memberikan Perlindungan

Bentuk-bentuk nasionalisme yang harus ditimbulkan berupa: (1) Nasionalisme kewarganegaraan, negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya dan keanggotaan bersifat sukarela; (2) Nasionalisme etnis (etnonasionalisme), negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat dan keanggotaan bersifat turun-temurun; (3) Nasionalisme romantik, negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari bangsa atau ras budaya etnis yang sesuai dengan idealisme; (4) Nasionalisme budaya, negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama; (5) Nasionalisme kenegaraan, kombinasi kewarganegaraan, etnis dan kenegaraan bangsa sebagai komonitas memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara; (6) Nasionalisme agama, negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama (Listyarti, 200)⁸.

3. Membangun Prinsip Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti luas adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bagian lain di dunia. Nasionalisme mengandung prinsip: (1) prinsip kebersamaan, menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2) persatuan dan kesatuan, menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap kesetiakawan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas dan berkeadilan sosial; dan (3) membangun prinsip demokrasi,

setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena hakikanya kebangsaan adanya tekad hidup bersama



Gambar 6. Perjuangan merebut kemerdekaan
Sumber: portalsejarah.com

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Lijphart, 1997).⁹

4. Membangun Patriotisme

Membangun pecinta dan pembela tanah air, sikap selalu mencintai dan membela tanah air, menjadi pejuang bangsa mempunyai semangat, sikap rela berkorban demi kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air. Adapun ciri patriotisme, yaitu: (1) Mencintai bangsa dan negara sendiri, membangun solidaritas untuk mencapai kesejahteraan bersama seluruh warga bangsa dan negara (solider bertanggung jawab atas seluruh bangsa); (2) Memandang bangsa dalam perspektif historis, masa lampau masa kini, dan masa depan bernilai budaya dan rohani bangsa, berjuang menuju cita-cita Negara; (3) Menerima, dan mengembangkan watak kepribadian bangsa memiliki identitas diri; (4) Melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, ikut terlibat dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain dengan sifat terbuka (Mangunhardjana, 1985)¹⁰

Sikap dan perilaku patriotik ditandai oleh adanya: (1) Rasa cinta pada tanah air; (2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa (3) Menempatkan persatuan, kesatuan, serta

keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan; (4) Berjiwa pembaharu; dan (5) Tidak mudah menyerah (Gutman, 2004).¹¹ Patriot memiliki rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya, kekaguman pada adat kebiasaan, menghargai sejarah dan kebudayaannya serta sikap pengabdian demi kesejahteraan bersama. Sikap patriot tumbuh dari sumber perasaan cinta pada tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya.

5. Membangun Karakter Bangsa

Bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa itu sendiri. Membangun karakter bersifat memperbaiki, membina, dan mendidik karakter berupa tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti generasi bangsa. Membangun karakter merupakan suatu usaha dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan membentuk tabiat, watak, akhlak generasi bangsa sehingga menunjukkan tingkah laku baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Suryadi, 2011)¹²

Membangun karakter bangsa pada hakikatnya untuk menmbuhkan sikap: (1) Saling menghormati dan menghargai diantara sesama; (2) Rasa kebersamaan dan tolong-menolong; (3) Rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa (3) Rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (4) Memiliki moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama; (5) Memiliki perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan; (6) Memiliki tingkah laku menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai budaya; dan (7) Memiliki sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan (Wahab dan Sapriya, 2011)¹³.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk

membina, memperbaiki dan membentuk tabiat, watak, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

6. Menumbuhkan Cinta Tanah Air

Rasa cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan rasa loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikan dan melestarikan alam dan lingkungan. Rasa cinta tanah air dan bangsa yang terangkum dalam semangat patriotisme harus selalu tertanam dalam setiap sanubari rakyat Indonesia.

Generasi pada masa penjajahan berhasil membangkitkan rasa cinta tanah air dan bangsa yang akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau saja rasa cinta tanah air dan bangsa sekali lagi bisa menjadi faktor yang memotivasi bangsa Indonesia, ada kemungkinan bangsa Indonesia akan bisa bangkit kembali dengan masyarakatnya bisa menghasilkan karya-karya yang membanggakan. Individu yang memiliki rasa cinta pada tanah airnya akan berusaha dengan segala daya upaya yang dimilikinya untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan dan segala apa yang dimiliki oleh negaranya. Rasa cinta tanah air inilah yang mendorong perilaku individu untuk membangun negaranya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuh kembangkan dalam jiwa setiap individu yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bangsa bersama dapat tercapai.

Rasa cinta tanah air dapat ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini agar dapat menghargai bangsa dan negaranya misalnya dengan upacara sederhana setiap hari senin dengan

menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengucapkan Pancasila. Pentingnya sebuah lagu kebangsaan dan menjadi identitas dari negara tersebut, agar dapat mengingat kembali betapa pentingnya cinta terhadap negara.

7. Membangun Nasionalisme Melalui Pendidikan

Nilai-nilai nasionalisme selalu dikaitkan dengan dunia pendidikan, karena untuk memaknai penanaman nilai-nilai tersebut diperlukan suatu upaya dari masyarakat Indonesia sendiri untuk berperilaku yang mengarah pada nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka dalam dunia pendidikan, baik formal maupun nonformal harus mengajarkan nilai nasionalisme.

Pendidikan umumnya menumbuhkan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada pada diri, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaannya. Oleh karena itu, nilai nasionalisme harus dijaga dan dilestarikan oleh semua kalangan, semua pihak, dan menyeluruh di semua cabang ilmu dalam dunia pendidikan di Indonesia terutama pada pendidikan dasar.

D. Peranan Nasionalisme di Sekolah

Nasionalisme berfungsi untuk memberikan identitas sosial pada diri seseorang, yaitu apakah ia termasuk bagian suatu kelompok. Keanggotaan tersebut akan melahirkan suatu konskuensi yang harus ditanggung oleh para anggota kelompok tersebut. Salah satu konskuensinya yakni para anggota kelompok berupaya secara aktif mempertahankan keutuhan kelompok dari ancaman yang datang dari luar. Crano menambahkan, nasionalisme sebagai suatu identitas sosial tidak berarti sebagai

suatu upaya penyeragaman para anggotanya. Setiap anggota dibebaskan memilih posisi dan porsinya sendiri, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dan tidak membahayakan keutuhan kelompok.

Identitas sosial merupakan suatu pengetahuan individu yang dimilikinya terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu bersama dengan keseluruhan perasaan dan nilai-nilai yang signifikan dengan keanggotaannya pada kelompok-kelompok sosial tersebut. Kelompok sosial terdiri atas dua atau lebih individu yang saling berbagi identifikasi sosial umum dari diri masing-masing, atau yang memiliki kemiripan tertentu dan merasa sebagai bagian dari kategori sosial yang sama. Individu akan senantiasa memelihara citra diri yang positif dengan mengikatkan diri ke dalam kelompoknya, agar dirinya dapat di pandang secara positif dalam kelompok.

Setiap warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan nasionalisme agar senantiasa menjaga keutuhan negara Indonesia dan berupaya memelihara citra diri yang dimilikinya dengan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Penanaman identitas sosial baru sebagai bangsa Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah agar generasi memiliki kesadaran kolektif untuk menggantikan “identitas negatif” yang diberikan kolonialis. Sebutan inlander pada masa kolonial mendorong kesadaran sejumlah orang yang terpelajar untuk berontak terhadap keadaan dan membentuk identitas sosial yang baru. Tujuannya untuk menentukan kedudukan kelompok dalam sistem masyarakat, serta menyadari batas-batas kedudukan golongan lain terhadap kelompok.

Rumusan nasionalisme Indonesia khas dan berbeda dengan nasionalisme bangsa lain, karena tujuan nasionalisme secara umum adalah memberikan label identitas terhadap suatu bangsa.

Meskipun dimungkinkan ada kesamaan antara konsep suatu bangsa dengan bangsa lain, namun karena dasar setiap negara berbeda maka tiap negara akan memiliki konsep berbangsa yang unik atau khas. Pancasila sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup) bangsa Indonesia maka wawasan kebangsaan Indonesia harus sejalan dengan kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila. Landasan UUD 1945 juga memberikan batasan bahwa nasionalisme Indonesia bertentangan dengan segala bentuk penindasan oleh seorang manusia terhadap manusia lain, oleh suatu negara terhadap negara lain dan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain.

Peran sekolah dapat menentukan kualitas berbangsa di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tiga pandangan, yaitu: (1) Pandangan ketahanan nasional yang sejalan dengan rumusan GBHN; (2) Pandangan karakteristik nasional yang menekankan kepribadian unik dari bangsa Indonesia; dan (3) Pandangan integrasi nasional yang menyiratkan upaya persatuan dari kemajemukan yang menjadi bagian bangsa dan negara Indonesia. Karakteristik dari nasionalisme yang dimiliki siswa digambarkan pada hasrat-hasrat untuk berprestasi, berencana, bertanggung jawab, keterbukaan, kemandirian, kehormatan, rasionalitas dan keadilan merupakan sendi-sendi utama dalam kualitas berbangsa dan bernegara seorang warga negara.

Sikap nasionalisme ditanamkan pada generasi untuk menjadi warga negara yang baik dan partisipatif dalam kegiatan politik dan pembangunan. Perkembangan negara didorong oleh peran sekolah yang mampu mendorong generasi menjadi warganya yang baik. Keberhasilan sekolah mendidik warga Negara dapat dilihat dari tujuh karakter, yaitu: (1) Terbuka terhadap pengalaman baru dan perubahan; (2) Mampu berpendapat dan menanggapi berbagai persoalan secara demokratis, serta tidak menutup diri terhadap pendapat yang berbeda; (3) Mempunyai perencanaan dan

berorientasi ke masa depan; (4) Percaya kepada kemampuan diri dan tidak pasrah terhadap nasib; (5) Memiliki harga diri dan mampu menghargai orang lain; (6) Mampu menggunakan teknologi dan pengetahuan untuk kemajuan dan peningkatan taraf hidup manusia; dan (7) Menjunjung keadilan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dirumuskan karakter sikap nasionalisme siswa, yaitu: (1) Cinta terhadap tanah air dan bangsa dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa; (2) Berpartisipasi dalam pembangunan; (3) Menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial; (4) Memanfaatkan iptek, menghindari sikap apatis, terbuka pada permbaharuan dan perubahan, serta berorientasi pada masa depan; (5) Berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain; dan (6) Siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional.

BAB II

Internalisasi Nilai Nasionalisme Generasi

Internalisasi nilai nasionalisme generasi muda paling strategis dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan memiliki pengaruh besar dalam membuka pikiran dan kesadaran pada persatuan, rasa kebangsaan, dan rasa kecintaan tanah air. Kalangan terdidiklah yang merintis rasa kebangsaan atau nasionalisme pada masa Kebangkitan Nasional 1908 (Darmaputra, 1988).¹⁴ Pada awal abad ke-20, dapat dikatakan fase pertama tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia. Kaum terdidik lebih menegaskan rasa nasionalisme tertera pada Sumpah Pemuda 1928, serta semakin mengukuhkannya melalui Proklamasi Kemerdekaan 1945 (Bachtiar, 1992).¹⁵

Saat-saat sangat penting di sekitar Proklamasi Kemerdekaan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara bagi negara kebangsaan Republik Indonesia. Pancasila yang saat itu merupakan kesepakatan politik yang luhur dari berbagai komponen bangsa mampu mewadahi nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai dasar lainnya (Gaffar, 1999).¹⁶ Tantangan generasi di era global sekarang ini, ketika sudah memasuki seratus tahun Kebangkitan Nasional dan enam puluh tiga tahun merdeka, beberapa pertanyaan pun muncul, apakah pendidikan masih relevan untuk menjaga perannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pancasila.

A. Tantangan Internalisasi Nilai Nasionalisme

Setelah seratus tahun kebangkitan nasional Indonesia, namun saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan upaya implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme pada bangsa Indonesia.

Pertama, nilai-nilai Pancasila sepertinya masih belum membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa Indonesia. Pancasila seakan hanya menjadi simbol saja, tanpa terimplementasi secara nyata baik pada tataran kehidupan kenegaraan maupun pada tataran kehidupan masyarakat (Budimansyah, dan Suryadi, 2008)¹⁷

Kedua, kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda pada era globalisasi ini mendapat pengaruh yang sangat kuat dari nilai-nilai budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Benninga, 1991).¹⁸ Ketiga, nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak dipandang mengalami erosi pada saat ini, terutama di kalangan generasi muda (Safria, 2008).¹⁹

Keempat, berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang penting nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia, dan lebih memandang penting universalisme. Pendukung paham ini juga menolak demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik dan pada ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting dan tepat bagi bangsa kita. Paham ini bukan hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga berkembang di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi (Sumartana, 2001).²⁰

Kelima, masih perlu dipertanyakan peran pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada generasi muda. (Winarno, 2007).

B. Sejarah Ibu Pertiwi Menanam Nilai Nasionalisme

Pancasila sebagai ideologi negara telah disepakati oleh *the founding fathers* sejak tahun 1945. Namun nilai-nilai Pancasila tidak berarti telah serta merta terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan, untuk beberapa lama, Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik

dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Penafsiran Pancasila pun kadang menjadi bermacam-macam tergantung golonganannya bahkan tergantung pada arus politik yang berkuasa (Ali, 2009).²¹

Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960-an, dalam kerangka *nation and character building*. Upaya ini dilakukan untuk meng-Indonesiakan orang Indonesia yang disesuaikan dengan visi dan misi politik penguasa pada masa itu. Oleh karena itu, bahan-bahan yang diberikan pun bukan hanya tentang Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik penguasa masa itu. Upaya menggelorakan semangat nasionalisme sangat tinggi pada bangsa Indonesia. Pada masa ini, upaya *nation and character building* ini bukan hanya untuk masyarakat luas pada umumnya, namun juga dilakukan melalui jalur pendidikan formal, misalnya melalui mata pelajaran *Civics* (Bagir, 2011).²² Sejarah mencatat, bahwa pada periode selanjutnya, yakni pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi.

Ketika awal Orde Baru berkuasa, yang pada saat itu bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, hal yang dibenahi pertama untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme adalah melalui jalur pendidikan formal (Bakry, 200).²³ Ketika Kurikulum persekolahan diubah pada tahun 1968, maka perubahan terhadap mata pelajaran yang mengembangkan misi pembinaan warga negara yang baik, yang Pancasilais, juga mengalami perubahan. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) pun masuk dalam kurikulum persekolahan sebagai mata pelajaran, dan materinya berisi Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibersihkan dari pengaruh pandangan Orde Lama (Freddy, 2009).²⁴

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme melalui jalur sekolah lebih diperjelas lagi dengan keluarnya Kurikulum 1975, di mana terdapat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila

(PMP) sebagai pengganti nama PKN. Dari namanya saja sudah tersirat bahwa mata pelajaran ini dimaksudkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para pelajar (Winarno, 2007).²⁵

Upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara meluas kepada semua lapisan masyarakat, birokrasi, dan persekolahan dilakukan oleh penguasa Orde Baru dengan ditetapkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 pada awalnya dilandasi oleh upaya dari pemerintah yang menginginkan agar nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh warga negara. P4 juga berpengaruh pada kurikulum persekolahan dan perguruan tinggi. Kurikulum PMP tahun 1984 dan terutama kurikulum PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) 1994 secara jelas menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme yang telah diuraikan di dalam P4. Kurikulum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, juga tidak lepas dari pengaruh P4. Diseminasi P4 melalui jalur pendidikan formal bukan hanya melalui kurikulum melainkan juga melalui penataran P4 untuk siswa dan mahasiswa baru (Zamroni, 2002).²⁶

Para pengembang Penataran P4 pada masa itu, sudah mencoba mengembangkan berbagai cara atau metode yang lebih baik dari sekedar indoktrinasi. Namun karena penataran P4 yang bersifat massal dan penafsiran Pancasila yang dianggap tunggal oleh penguasa, maka penataran P4 ini pun oleh kaum pendukung reformasi dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi ala Orde Baru (Sunardi, 1997).²⁷

Ketika memasuki masa reformasi, terjadi pula perubahan pada upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Kurikulum PPKn di sekolah pun mengalami perubahan baik dari nama maupun substansi materinya. Begitu juga kurikulum pada mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, mengalami perubahan. Materi yang berbau Orde Baru dihapuskan dari kurikulum dan diganti dengan

materi-materi yang lebih sesuai dengan visi dan misi politik Orde Reformasi (Fatah, 1994).²⁸

Kurikulum PPKn dalam kurikulum persekolahan 1994 yang dulu sangat berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diganti dengan Kurikulum PKN 2004 dan 2006 yang lebih bersifat konseptual teoritis. Mata kuliah yang mengemban pembinaan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik dan Pancasilais, juga mengalami pengecilan peran. Secara formal, mata kuliah Pendidikan Pancasila pada sebagian besar perguruan tinggi, dihilangkan dan disatukan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan demikian, sebenarnya pada masa ini dalam kurikulum formal baik di jenjang persekolahan maupun perguruan tinggi, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme, mengalami penurunan intensitas. Di luar lembaga pendidikan formal, seperti di lingkungan birokrasi dan masyarakat pada umumnya, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme pada masa reformasi, bahkan lebih tidak jelas lagi

C. Revitalisasi Peran Pendidikan Ibu Pertiwi

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, di Indonesia, sejak tahun 1960 Pendidikan Kewarganegaraan (*Civics*) merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sejak saat itu pula, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran, selalu ada dalam kurikulum yang berlaku dan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Dalam dua undang-undang sistem pendidikan nasional terakhir, yaitu UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan selalu dinyatakan sebagai program atau mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi (Zamroni, 2001).²⁹

Jika dianalisis perkembangannya sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat

tergantung pada konteks politik. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dapat bebas dari pengaruh rezim politik yang memerintah. Kemauan politik dari pemerintah, seringkali tercermin pada tujuan dan isi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan seringkali merupakan mandat politik dan alat ideologi rezim. Sebagai akibatnya, Pendidikan Kewarganegaraan berubah ketika rezim politik berubah (Bunyamin, 1990; Winataputra, 1999).

Pada masa reformasi sekarang Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu dilakukan revitalisasi dan reorientasi, baik menyangkut tujuan, misi, kompetensi yang diharapkan, materi, pendekatan dan strategi pembelajarannya. Dengan revitalisasi dan reorientasi ini, diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan tidak terjebak lagi menjadi program indoktrinasi politik penguasa. PKn diharapkan lebih mampu menjadi program pendidikan yang secara teoritis, konseptual, dan praksis memiliki konsistensi atau keajegan sebagai pembina warganegara yang baik dan demokratis dengan meminimalisasi pengaruh mandat politik rezim yang berkuasa (Engle dan Ochoa, 1988).³⁰

Jadi pada era reformasi saat ini, ada keinginan baru untuk mereformasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia agar kurang bergantung pada pengaruh politik. Selanjutnya Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang baru didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai demokratis universal dan juga nilai-nilai Indonesia asli yang lebih stabil dari pada perubahan politik. Tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan tampaknya perlu memperluas misinya dari sekedar pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut:

Pertama PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan

kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.

Kedua PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini.

Ketiga PKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme siswa, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.

Keempat PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Kelima PKn sebagai pendidikan multikultural (*multicultural education*), yang berarti PKn diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan sikap toleran siswa dan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikultural.

Keenam PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PKn membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Melihat misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang demikian luas, maka tujuan PKn pun perlu lebih diperluas pula. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Apa yang dimaksudkan atau ditujukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut undang-undang itu ternyata sangat sederhana, yang hanya memuat dua kompetensi yang harus dimiliki warga negara, yakni *rasa kebangsaan* dan *cinta tanah air* (Azhari, 2005).³¹

Tujuan ini tentu sangat relevan dengan upaya pembinaan nilai-nilai nasionalisme. Namun tujuan seperti ini masih belum menggambarkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal dan komprehensif yang sesuai dengan tuntutan masa kini. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih jelas, lebih lengkap dan lebih komprehensif dapat kita temukan pada pendapat beberapa pakar dan organisasi profesi pendidikan. Menurut pendapat *The National Curriculum Council* (Edwards dan Fogelman, 2000).³²

Pendidikan Kewarganegaraan (*Education for Citizenship*) bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menggali, membuat keputusan yang berpengetahuan, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang demokratis (Cagon dan Derricot, 1998).³³

Senada dengan asumsi fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara para warga negara dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya (Sanusi, 1999).³⁴

Sosok warganegara yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut Sanusi (1999) adalah warganegara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri

dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, sering diterpa oleh konflik sosial, dibutuhkan warganegara yang memiliki karakteristik pribadi yang kuat yang dapat hidup secara fungsional pada masa globalisasi yang sangat kompetitif.

Karakteristik yang perlu dimiliki warganegara pada masa kini yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) kemauan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) memiliki kepekaan terhadap hak asasi dan mampu untuk mempertahankannya (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); dan (8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional (Cogan dan Derricot, 1998). Upaya membina siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, para siswa harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dan masalah masyarakatnya, termasuk memecahkan masalah konflik antarpribadi dan antarkelompok, dalam cara-cara yang damai dan demokratis.

Pada dasarnya banyak kemungkinan bagi siswa untuk mengalami hidup dalam demokrasi yang nyata di lingkungan sekolah mereka, seperti di kelas yang heterogen, di tempat bermain, di ruangan olah raga dan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. “...*within and among these settings problems of common living are identified and mutual deliberation and problem-solving activity is undertaken as a routine practice of school life...*” (Parker, 1996).³⁵ Situasi seperti ini,

Pendidikan Kewarganegaraan dapat memainkan peran dalam mendidik siswa untuk terlibat dalam memecahkan masalah termasuk masalah-masalah konflik pada kehidupan sekolah dan kehidupan sosial sehari-hari.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai untuk masa kini adalah membina warganegara Indonesia yang baik, yakni warganegara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki jiwa yang merdeka, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, berjiwa demokratis, mampu menghargai perbedaan etnis, budaya dan agama, mampu berfikir kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara demokratis, menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan, mematuhi hukum, berdisiplin, menghargai lingkungan hidup, dan mampu berpartisipasi secara cerdas dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan global.

Sejalan dengan misi dan tujuan Pendidikan kewarganegaraan di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu memiliki tiga fungsi pokok dalam pengembangan warganegara demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*).

Kompetensi warganegara yang baik meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*). Pengembangan ketiga hal ini (*civic intelligence civic knowledge, civic responsibility civic dispositions, dan civic participation civic skills*) menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bersifat multidimensional dan terpadu dalam ranah (*domain*) yang dikembangkannya.

Melihat pada kompetensi utama yang perlu dikembangkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan di atas, maka salah satu misi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai pendidikan aspek afektif, yakni pendidikan budi pekerti (karakter), nilai dan moral. Misi sebagai pendidikan aspek afektif ini terutama berkaitan dengan fungsi pengembangan *civic responsibility* atau *civic dispositions*.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan afektif atau pendidikan nilai, lebih mirip dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Inggris. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan moral dan nilai. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah nilai-nilai pilihan yang dipertimbangkan sebagai “nilai-nilai Indonesia yang baik”, dan nilai-nilai tersebut mencakup pula nilai-nilai demokrasi universal. Namun demikian, pendekatan untuk mengajarkan nilai-nilai ini semestinya tidak dilakukan melalui indoktrinasi nilai-nilai untuk mempertahankan status quo, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih demokratis, seperti dalam tradisi *reflective inquiry* (Edwards dan Fogelman, 2000).

Berdasarkan misi, fungsi, dan tujuan PKn demikian luas, maka PKn di Indonesia perlu mengikuti interpretasi yang maksimal. Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*) dapat diinterpretasikan dalam versi minimal dan maksimal. Interpretasi minimal berarti hanya menuntut pembahasan ke dalam pengetahuan dasar dari aturan-aturan yang telah melembaga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Interpretasi maksimal, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, kemerdekaan fikiran tentang isu-isu sosial, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan politik (Evans, 2000).³⁶

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebaiknya dikembangkan dengan menggunakan interpretasi maksimal, karena ia akan menjadi

lebih memiliki kekuatan dan lebih fungsional untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan interpretasi maksimal dan melalui tradisi reflektif inkuiri, Pendidikan Kewarganegaraan sekarang lebih diharapkan mampu memecahkan problema implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme secara lebih kritis dan demokratis.

Meskipun banyak ahli pendidikan memandang bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, namun tidak semua negara mempunyai tingkat minat yang sama untuk mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan. Beberapa negara menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan “... *remains optional, fragmented, poorly resourced, lacking of theoretical base and taught by reluctant or poorly trained teachers...*” (Rowe, 2000). Kondisi ini terjadi juga pada Pendidikan kewarganegaraan selama di Indonesia. Masalah ini menggambarkan suatu tantangan dalam mengembangkan PKn di Indonesia (Somantri, 2001;³⁷ Winataputra dan Budimansyah, 2007).³⁸

Pembaruan Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan kondisi perubahan sosial masa kini dapat dilakukan dengan model PKn didasarkan pada sepuluh pilar demokrasi. Kesepuluh pilar demokrasi tersebut meliputi: Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, kerakyatan yang cerdas, pembagian kekuasaan negara, otonomi daerah, *rule of law*, pengadilan yang merdeka, kemakmuran umum, dan keadilan sosial (Sanusi, 1999).

Sisi kedua dari model yang dikemukakannya adalah membangun visi, sikap dan mutu perilaku para pemainnya yang demokratik dalam sosok warganegara yang baik, yakni warga negara yang merdeka, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif, dan membangun diri bersama jaringan kerjanya menuju masyarakat belajar yang madani dan demokratik (Sapriya dan Winataputra, 2004).³⁹

Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu direvitalisasi, berkaitan dengan materinya. Berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Barat yang materinya banyak berasal dari pengetahuan ekstraseptif, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengetahuan intraseptif, yang berasal dari nilai-nilai agama (misalnya menyangkut masalah keimanan dan ketaqwaan) dan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Branson, 1999).⁴⁰

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa secara kontekstual logika internal dan dinamika eksternal sistem pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh aspek-aspek pengetahuan intraseptif berupa agama dan Pancasila; pengetahuan ekstraseptif ilmu, teknologi, dan seni; cita-cita, nilai, konsep, prinsip dan praksis demokrasi; masalah-masalah kontemporer Indonesia; kecenderungan dan masalah globalisasi; dan kristalisasi *civic virtue* dan *civic culture* untuk masyarakat madani Indonesia; masyarakat negara kebangsaan Indonesia yang berdemokrasi konstitusional (Somantri, 2001).⁴¹

Pembaharuan lain dari Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia adalah keinginan untuk membuat Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih berdaya (*powerful*) dalam mendorong partisipasi siswa pada kehidupan sosial yang demokratis. Hal ini berkaitan dengan upaya revitalisasi pada pendekatan, metode dan strategi pembelajarannya. Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan didorong untuk menggunakan metode mengajar yang lebih demokratis daripada metode yang indoktrinatif. Demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, toleransi, kerjasama, dan menghargai orang lain adalah di antara isi (materi) Pendidikan Kewarganegaraan yang utama (Zamroni, 2011).⁴²

Merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi, guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan mestinya bukan sekedar mengajar tentang demokrasi (*teaching about democracy*), dan mengajar untuk berdemokrasi (*teaching for democracy*), tetapi juga mengajar dalam suasana yang

demokratis (*teaching in democracy*). Oleh karena itu para guru mesti menjadi contoh (model) yang baik untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah dan masyarakat (Elmubarok, 2007).⁴³

Dengan melihat pada revitalisasi dan reorientasi misi, fungsi dan tujuan serta karakteristik PKn di atas, maka PKn memiliki peran yang sangat strategis untuk tetap menjalankan misi dan fungsinya sebagai mata pelajaran yang dapat membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme ke dalam diri siswa. Oleh karena itu PKn tetap diharapkan memuat nilai-nilai luhur yang terkandung pada nilai sentral (*central values*) bangsa Indonesia, yakni Pancasila, termasuk di dalamnya nilai-nilai nasionalisme.

D. Pendekatan Pembelajaran Nasionalisme Ibu Pertiwi

Pendekatan dan prinsip pembelajaran PKn dalam tulisan ini lebih difokuskan pada bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Internalisasi nilai Pancasila dan nasionalisme melalui PKn dapat dihipotesiskan oleh dua perspektif teori perolehan nilai, yakni perspektif sosialisasi dan konstruktivisme. Teori perolehan nilai ini, berkaitan dengan bagaimana manusia atau seorang anak memperoleh suatu nilai.

Psikoanalisa dan teori belajar sosial, menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana seorang anak menjadi manusia yang bermoral atau memiliki nilai. Kedua teori ini menawarkan sebuah konsep internalisasi, yakni; "*the adoption of pre-existing, ready-made standards for right actions as one's own*" (Berk, 1994). Sigmund Freud, seorang tokoh psikoanalisa, meyakini bahwa anak-anak memperoleh nilai atau moralitas mereka langsung dari orang tuanya, dan mereka bertindak sejalan dengan resep-resep moral untuk menghindari perasaan bersalah.

Teori belajar sosial (*social learning theory*) menyatakan, bahwa anak-anak memperoleh nilai atau perilaku bermoral melalui pencontohan dan penguatan (*reinforcement*). Pendukung teori ini

mengakui, bahwa anak-anak mulai berperilaku dalam cara-cara yang konsisten dengan standar orang dewasa karena para orang tua dan guru menindaklanjuti “perilaku yang baik” dengan penguatan positif dalam bentuk persetujuan, kasih sayang (afeksi), dan hadiah lainnya (Berk, 1994).

Mereka meyakini bahwa anak-anak belajar untuk berperilaku moral secara luas melalui pencontohan (*modeling*), dengan mengamati dan meniru orang dewasa yang melakukan perilaku yang pantas. Teori belajar sosial dan teori psikoanalisa merujuk, terutama pada pewarisan norma moral dan nilai dari masyarakat kepada anak. Orientasi internal mereka mencerminkan internalisasi norma dan nilai tersebut (Gibbs, 1991). Dengan kata lain, teori ini mendekati nilai dan moral dari perspektif sosialisasi. Sementara itu, teori perkembangan kognitif, mengkritik perspektif sosialisasi dan nilai dari masyarakat kepada anak. Orientasi internal mereka mencerminkan internalisasi norma dan nilai tersebut (Gibbs, 1991). Dengan kata lain, teori ini mendekati nilai dan moral dari perspektif sosialisasi.

Sementara itu, teori perkembangan kognitif, mengkritik perspektif sosialisasi dan meyakini bahwa Identifikasi dengan orang tua, pengajaran langsung, pencontohan, dan penguatan bukan merupakan cara utama anak-anak menjadi manusia bermoral. Alih-alih hanya secara sederhana menginternalisasi aturan dan harapan yang telah ada, teori perkembangan kognitif berasumsi bahwa individu berkembang moralnya melalui pembentukan (konstruksi) makna moral.

Pembelajaran PKn hendaknya dikembangkan melalui *cooperative learning* (belajar secara bekerja sama), daripada hanya pengajaran yang mengembangkan kompetisi individual. *Cooperative learning* bukan hanya dapat membantu meningkatkan kemampuan akademis secara bersama-sama untuk semua siswa, tetapi mampu pula mengembangkan sikap-sikap positif, seperti sikap kerjasama, toleransi, menghormati perspektif orang lain dan empati.

Pembelajaran PKn hendaknya mampu mengajak siswa untuk melakukan aktivitas sosial yang riil (*social action*). Dengan demikian siswa bukan hanya belajar di dalam ruangan kelas saja, tetapi juga dapat di luar kelas atau di masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang nyata yang dapat bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi masyarakatnya. Hal ini perlu untuk menumbuhkan kemampuan siswa sebagai aktor sosial, yakni warga masyarakat yang memiliki kepekaan atau kepedulian sosial dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial dengan baik.

E. Pembudayaan Nilai Nasionalisme di Sekolah

Globalisasi mempengaruhi budaya dan kepribadian generasi bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sekarang. Sehubungan dengan globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan kaburnya batas-batas antar negara (baik secara politik, ekonomi, maupun sosial), masalah nasionalisme tidak lagi dapat dilihat sebagai masalah sederhana yang dapat dilihat dari satu perspektif saja. Sehingga sikap nasionalisme perlu dipupuk sejak dini agar tercipta generasi muda yang memiliki sifat cinta tanah air dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan melalui pendidikan (Amal dan Armawi, 1998).⁴⁴

Pendidikan hingga kini masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan sesuai dengan landasan dan tujuannya pendidikan itu. Membentuk manusia yang cerdas yang diimbangi dengan nilai keimanan, ketaqwaan dan berbudi pekerti luhur, belum dapat terwujud.

Gejala kemerosotan nilai-nilai akhlak dan moral dikalangan masyarakat sudah mulai luntur dan meresahkan. Sikap saling tolong-menolong, kejujuran, keadilan dan kasih sayang tinggal slogan belaka. Krisis akhlak pada elite politik terlihat dengan adanya penyelewengan, penindasan, saling menjegal atau adu domba, fitnah dan perbuatan maksiat lainnya.

Pada lapisan masyarakat, krisis akhlak juga terlihat pada sebagian sikap mereka yang sangat mudah merampas hak orang lain, misalnya menjarah. Di sinilah letak penting dan sentralnya peran dunia pendidikan dalam membawa para peserta didik khususnya dan generasi muda pada umumnya untuk menuju ke arah perubahan sosial yang sekaligus bermakna kemajuan sosial dan kemajuan bangsa.

Perubahan sikap dan perilaku para remaja saat ini sangat mengkhawatirkan lebih-lebih jika dikaitkan dengan dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan strategi yang berdampak luas terhadap eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek eksternal, globalisasi menimbulkan pertemuan antar budaya (*culture ecouter*) bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan kata lain, globalisasi berdampak pada terjadinya perubahan sosial (*social change*) besar-besaran yang belum tentu semua perubahan itu kongruen dengan kemajuan sosial (*sosial progress*) (Nash, 2000).⁴⁵

Dari aspek internal, kondisi objektif bangsa Indonesia yang memang sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara dengan bangsa yang dibangun di atas keragaman dan perbedaan, yakni perbedaan suku, agama, ras, etnis, budaya dan lain-lain. Di satu sisi, jika mampu mengelolanya dengan baik, maka keragaman akan menimbulkan keindahan dan harmoni, sebaliknya jika tidak mampu mengelolanya keragaman ini akan memiliki potensi yang memunculkan perselisihan dan sengketa yang mengarah ke perpecahan dan disintegrasi bangsa.

Nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme. Pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat tersebut oleh para pejuang kemerdekaan dihidupi tidak hanya dalam batas waktu tertentu, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa mendatang.

Sekarang banyak sekali ditemukan anak-anak yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka dicat beraneka warna. Pendapat mereka kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya. Tidak banyak peserta didik yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Secara sosiologis dan psikologis, selain masyarakat luas, komunitas yang paling mudah terkena pengaruh fenomena global itu adalah kalangan generasi muda, khususnya peserta didik, yang berada dalam fase kehidupan pancaroba yang labil dan fase pencarian identitas diri. Fenomena ini sesungguhnya menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Apakah globalisasi akan berakibat pada kemerosotan atau sebaliknya. Jika pengaruh-pengaruh di atas dibiarkan, maka moral generasi bangsa menjadi rusak dan akan timbul tindakan anarkis antara golongan muda. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat.

Dalam realita sikap nasionalisme peserta didik sekarang semakin menurun sebagai bukti yaitu pada saat upacara hari senin di sekolah, pada saat upacara peringatan hari besar seperti HUT RI dan Hari Pendidikan Nasional mereka mengikuti upacara sambil bergurau dengan teman sebelahnya dan mereka tidak mengikuti jalannya upacara secara hikmat. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari pemakaian produk dalam negeri semakin menurun sedangkan produk luar negeri semakin meningkat.

Masih kurangnya mendapat pengetahuan tentang pentingnya sikap nasionalisme, maka melalui mata pelajaran PKn, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Ekstrakurikuler pramuka diharapkan peserta

didik mempunyai jiwa nasionalisme agar mereka memiliki rasa cinta terhadap tanah air, rela berkorban demi bangsanya sendiri dan juga dapat lebih mencintai produk dalam negeri. Untuk itu perlu adanya suatu pembudayaan nasionalisme dikalangan peserta didik khususnya dikalangan SMP agar mengetahui arti penting nasionalisme dan memiliki jiwa nasionalisme sehingga bangsa kita tetap aman, nyaman dan damai.

F. Pengintegrasian Budaya Lokal dan Nasional dalam Pendidikan

Pembudayaan dalam pendidikan merupakan sebuah penanaman pendidikan yang mampu merefleksikan nilai baik budaya lokal maupun nasional kepada peserta didik dengan tujuan untuk menumbuhkan kebanggaan rasa bangga terhadap tanah airnya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab atau proteksi terhadap kebudayaan asli Negara.

Nilai-nilai budaya lokal dan nasional yang ditanamkan secara mengakar merupakan ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam proses pendidikan mengenai adat istiadat lokal yang ada di daerah-daerah dan adat istiadat diakui dan dijadikan identitas bangsa. Mengingat Indonesia adalah negara yang multi-budaya maka muatan pendidikan budaya lokal yang terimplementasi dalam bentuk kurikulum budaya lokal akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam model pendidikan ini. Sedangkan kurikulum yang bermuatan budaya nasional akan sama antara satu daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam hal ini budaya nasional merupakan semua nilai-nilai budaya bersama yang sudah melebur dalam budaya nasional (Suseno, 1997).⁴⁶

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi peserta didik secara optimal disinergikan dengan lingkungan dimana peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tidak terpisahkan dengan lingkungan dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka

tidak akan mengenal budayanya dengan baik dan akan menjadi orang asing dalam lingkungan budayanya selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka tidak mengenal dan mengetahui budayanya.

Budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari lingkungan terdekatnya berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh setiap manusia. Apabila peserta didik asing dengan budaya terdekat maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan. Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan.

G. Strategi Pembudayaan Nasionalisme di Sekolah Menengah Pertama

Pembudayaan Nasionalisme di SMP dapat disinergikan kedalam seluruh rangkaian kegiatan yang ada di sekolah. Pembudayaan Nasionalisme harus segera dijalankan mulai dari usia dini yaitu dari lingkungan keluarga terlebih dahulu dilanjutkan di lingkungan sekolah. Proses ini disebut enkulturasi karena proses pembudayaan dilakukan melalui proses sudah tertanam pada warga di suatu masyarakat, yang mula-mula dari lingkungan keluarga dan kemudian dari teman-temannya (Budiyanta, 2010).

Proses pembudayaan nasionalisme melalui proses enkulturasi dapat diwujudkan melalui Pembelaan Negara, kegiatan sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air, mata pelajaran PKN, mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Upacara Bendera serta melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Penerapan pembudayaan nasionalisme di SMP dapat dilakukan dengan beberapa strategi, antara lain:

1. Kegiatan Pembelaan Negara

Penerapan pembudayaan nasionalisme dapat dilakukan melalui kegiatan pembelaan negara dalam wujud nyata dan sederhana yaitu mengajarkan kepada siswa untuk selalu menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan sekolah.

2. Kegiatan Cinta Tanah Air

Penerapan pembudayaan nasionalisme juga dapat diterapkan melalui kegiatan cinta tanah air dalam bentuk yang sederhana sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air yaitu dengan cara menggunakan produk dalam negeri, serta memperingati hari Besar Nasional di lingkungan sekolah yaitu dengan mengadakan lomba-lomba.

3. Mata Pelajaran PKn

Pembudayaan nasionalisme juga dapat diterapkan melalui mata pelajaran PKn menggunakan cara di setiap materi disisipkan bentuk-bentuk dan contoh-contoh penanaman nilai karakteristik bangsa misalnya rasa tanggung jawab, kedisiplinan, keberanian, agar siswa dapat berfikir secara kritis, kreatif dan rasional.

4. Mata Pelajaran Pendidikan Agama

Penerapan pembudayaan nasionalisme juga dapat diterapkan melalui mata pelajaran Pendidikan Agama dengan cara membiasakan siswa untuk mengawali dengan do'a sebelum dan sesudah pelajaran dimulai, selain itu mengajarkan agar selalu menghormati orang tua, dan mengajarkan agar saling mengingatkan jika ada teman yang berkelakuan tidak baik.

5. Upacara Bendera

Penerapan pembudayaan nasionalisme juga dapat dilakukan melalui upacara bendera dengan cara siswa diikut sertakan untuk

menjadi petugas upacara bendera dan diharapkan siswa memiliki rasa tanggung jawab dengan tugas yang diberikan untuk menjadi petugas upacara.

6. Kegiatan Ekstrakurikuler

Penerapan kebudayaan nasionalisme juga dapat dilakukan melalui ekstrakurikuler, salah satunya yaitu Pramuka dengan cara siswa diajak untuk mengikuti kegiatan bakti sosial di lingkungan masyarakat sebagai wujud dari kepedulian siswa terhadap lingkungan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan atau nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pendidikan pada saat ini, juga masih tetap diharapkan memainkan peran strategis dalam membina dan meningkatkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda.

Mata pelajaran PKn memiliki peran strategis dalam membina nilai-nilai nasionalisme. Diharapkan saat ini PKn perlu memperluas misinya bukan sekedar sebagai pendidikan politik, melainkan juga sebagai pendidikan nilai, pendidikan nasionalisme, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan multikultural dan pendidikan resolusi konflik.

PKn perlu menggunakan interpretasi maksimal, yang berarti PKn mesti mengembangkan kemampuan kritis dan reflektif, kemerdekaan fikiran tentang isu-isu sosial, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial dan politik. PKn bukan sekedar melaksanakan tradisi transmisi nilai-nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*), tetapi juga mestinya lebih bersifat *reflective inquiry*, yang berarti mendidik siswa untuk secara kritis mengkaji dan memecahkan permasalahan kemasyarakatan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dengan penuh keyakinan.

BAB III

Nasionalisme di Daerah Disintegrasi dan Perbatasan

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap pola hidup berbangsa berorientasi pada nasionalisme materialis dalam jiwa generasi pengisi kemerdekaan dibandingkan jiwa pejuang kemerdekaan bernilai nasionalisme murni melawan kolonialisme. Sedangkan nasionalis materialis merupakan kecenderungan orientasi nilai bergeser menjadi hedonis berorientasi kepada materi diukur berdasarkan berapa banyak materil, berapa tinggi kekuasaan, dan apa jabatan dalam pemerintahan.

Globalisasi juga membawa pengaruh berarti disektor budaya nasionalisme lokal menjadikan sistem budaya homogenitas seluruh dunia mengagungkan hak otonom individu, hak asasi manusia, hak keadilan, hak referendum dan hak kemerdekaan. Dampak perkembangan telekomunikasi dan informasi membawa pengaruh pada persinggungan kuat budaya global dengan budaya lokal didiseminasi secara luas di Indonesia khususnya daerah konflik, antara lain: Timor Timur, Papua Merdeka dan Aceh Merdeka membuat nasionalisme ternoda dengan dalih ketimpangan keadilan nasional.

A. Nasionalisme Aceh Dualisme Bendera

Benang kusut nasionalisme di Aceh berdalih faktor ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan antara pusat dan daerah. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% anggaran pendapatan nasional dari kontribusi 14%. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi dihasilkan Aceh pada



Gambar 7. Pengibaran dua bendera
Sumber: m.tribunnews.com

1970-an dan 1980-an \$ 1,3 miliar US Dolar tidak memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Aceh. Akibat ketidakadilan menimbulkan kecelesakaan nasionalisme Indonesia di Aceh akhirnya mencuat aksi referendum dan mengibarkan bendera bintang bulan melancarkan aksi radikal bergerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pasca MoU Helsinki anggota parlemen Aceh sempat mengesahkan bendera tersebut sebagai bendera Aceh yang hendak dikibarkan bergandengan dengan bendera merah putih (Kawilarang, 2008).

1. Duka Nasionalisme di Aceh

Pada masa orde baru resolusi konflik Aceh umumnya lebih mengedepankan penggunaan pendekatan keamanan (*security approach*) ketimbang pendekatan dialog. Terbukti tiga jenis operasi militer digunakan pemerintahan Soeharto, yaitu: (1) Operasi Sadar dan Siwah (1977-1982); (2) Operasi Jaring Merah (Mei 1989-Agustus 1998); dan (3) Operasi Wibawa (Januari-April 1999). Meskipun yang ketiga secara periodisasi masuk era reformasi, tapi penulis menganggap masih dalam periode transisi mengikuti pola lama lebih dikenal dengan sebutan “masa DOM” (Daerah Operasi Militer). Akibat respon represif bertubi-tubi, GAM melakukan pelebaran jaringan pada tingkat internasional sehingga GAM bisa terus bertahan dan membelah nasionalisme Indonesia di Aceh (Yuniarti, 2008).

Terbelahnya nasionalisme di Aceh akibat konflik berlangsung lama menggores luka dan duka mendalam dalam kontek nasionalisme dikabuti oleh kekerasan menelan banyak korban nyawa demi memperjuangkan nasionalisme. Resolusi konflik di Aceh melalui kekerasan justru menambah masalah baru. Kekerasan membuat nasionalisme memudar, menambah kebencian dan menggiring bangsa menuju kehancuran. Resolusi konflik di Aceh melalui jalan damai merupakan cara terbaik untuk mengatasi konflik dan merajut kembali nasionalisme generasi muda Aceh.

2. Nasionalisme Melalui Pendekatan Militer di Aceh

Pada era reformasi adanya upaya kombinasi operasi militer dengan pendekatan hukum dan sosial. Pada masa ini muncullah, yaitu: (1) Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999-Januari 2000); (2) Operasi Sadar Rencong II (Februari-Mei 2000); (3) Operasi Cinta Meunasah I (Juni-September 2000); (4) Operasi Cinta Meunasah II (September 2000-Februari 2001); (5) Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum I (Februari-Agustus 2001); (6) Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum II (September 2001-Februari 2002); dan (7) Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum III (Februari-November 2002). Namun berbagai operasi tersebut tidak efektif karena eskalasi kekerasan tidak mereda hingga diputuskan Operasi Darurat Militer I (19 Mei-19 November 2003) (Yuniarti, 2008).

Segala pendekatan militer telah ditempuh justru semakin memperkusut nasionalisme Indonesia di Aceh samapai mata pelajaran PKn dihapus di sekolah, upacara bendera ditiadakan, lagu wajib “Indonesia Raya” banyak generasi waktu itu tidak bisa menyanyikannya, bahkan sempat terjadi pembakaran sekolah dan pergantian hari libur jum’at bersekolah di hari minggu. Resolusi konflik Aceh di era reformasi juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan non-militer, namun semuanya gagal karena kekerasan tidak kunjung reda.

3. Nasionalisme Melalui Resolusi Konflik di Aceh

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid awal tahun 2000 angin segar mulai berhembus. Ia mencoba melakukan pendekatan baru disebut dengan pendekatan ekonomi dan politik, dan mencoba membuka dialog damai dengan GAM. Pada 12 Mei 2000, melalui mediasi Henry Dunant Centre (HDC) menandatangani “Jeda Kemanusiaan” (*Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*) berlaku 2 Juni 2000-15 Januari

2001. Sayangnya kekerasan masih terjadi. Jeda tersebut kemudian diganti lagi melalui Kesepakatan Dialog Jalan Damai pada Maret 2001, namun juga tidak menghasilkan kemajuan berarti. Akhirnya pada 11 April 2001, Presiden mengumumkan Instruksi Presiden No.4/2001 tentang Langkah Menyeluruh untuk Penyelesaian Masalah Aceh, kembali luka dalam deklarasi keadaan darurat untuk Aceh membuka jalan peningkatan operasi militer (Nurhasim, 2008).

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri Juli 2001 mebangun resolusi dengan Kesepakatan Penghentian Kekerasan (*Cessation on Hostilities Agreement, CoHA*) yang ditandatangani di Jenewa pada 9 Desember 2002. Langkah ini berakhir dengan goresan luka mendalam dikeluarkan Keputusan Presiden No.18/2003 yang diumumkan pada 19 Mei 2003 untuk menerapkan status darurat militer di Aceh. Akibatnya bisa ditebak, sejarah berulang, kekerasan demi kekerasan terus berlangsung (Gayatri, 2008).

4. Merajut Kembali Nasionalisme dalam Perdamaian di Aceh

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memenangi pemilu 2004, menyebabkan *second track diplomasi* dapat dijalani dengan baik. Musibah tsunami 26 Desember 2004 membawa berkah turut mengambil peran jalannya perdamaian di Aceh. Pemerintah dan GAM memilih solusi damai pada Januari hingga Juli 2005, pemerintahan SBY-JK melakukan lima kali “pertemuan informal”



Gambar 8. Semangat berdiskusi nasionalisme
Sumber: m.tribunnew.com

dengan GAM di Helsinki. Pertemuan informal itu difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) diketuai mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari (Bhakti, 2008). Perundingan disertai dengan tarik ulur kepentingan tanpa pertumpahan darah akhirnya menghasilkan Nota Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM ditandatangani 15 Agustus 2005, disebut MoU Helsinki.

Sebuah kompromi politik resolusi konflik di Aceh, sehingga tidak menghasilkan formula *win-win solution* namun lebih ke *lose-lose solution*. Di satu sisi GAM kalah selangkah karena mengubah tuntu-tannya dari *self-determination* menjadi *self-government*, dan menerima konstitusi RI. Di sisi lain, Pemerintah RI juga kalah selangkah karena tidak berhasil membubarkan GAM, dan hanya membubarkan Tentara Negara Aceh (TNA) sekarang berubah menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). Namun dengan munculnya formula kompromi di mana demokrasi lokal menjadi instrumen bagi kedua belah pihak, cara ini dapat menyelamatkan nyawa ribuan orang di Aceh senantiasa terhimpit oleh kekerasan demi kekerasan akibat konflik (Nuraini, 2008).

Dalam MoU Helsinki disebutkan bahwa Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah RI sesuai dengan konstitusi. Disepakati pula untuk membentuk partai-partai lokal berbasis di Aceh (Nota MoU Helsinki, 2005).

Strategi membangun nasionalisme generasi muda Aceh pasca konflik melalui pembelajaran PKn telah menarik perhatian banyak peneliti dilakukan dengan berbagai cara di berbagai negara mengkaji dari beberapa aspek, antara lain: (1) membangun nasionalisme melalui pembelajaran aktif; (2) membangun

nasionalisme melalui pengembangan bahan ajar; (3) membangun nasionalisme melalui pembelajaran berbasis budaya dan lingkungan sosial; (4) membangun nasionalisme generasi muda melalui peningkatan profesionalisme guru PKn; (5) membangun nasionalisme generasi muda untuk menjaga ketahanan tradisi kewarganegaraan; dan (6) membangun peran penting generasi muda dalam konteks nasionalisme.

Pertama membangun nasionalisme melalui model dan bahan pembelajaran untuk memperkuat wawasan kebangsaan layanan pembelajaran aktif dan pendidikan kewarganegaraan di Inggris (Jerome, 2011), pengembangan pendidikan kewarganegaraan studi komparatif kasus di Argentina (Astiz dan Mendez, 2006), pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi belajar: pentingnya mereka bagi partisipasi politik kaum muda (Yoldaş, 2015).

Kedua Membangun nasionalisme melalui pengembangan bahan ajar dan peningkatan pemahaman memasukkan isu hak asasi manusia dan pendidikan perdamaian di buku pelajaran kewarganegaraan Lebanon (Shuayb, 2015), meningkatkan pemahaman pendidikan kewarganegaraan di Irlandia Utara dan Republik Irlandia: wacana publik antara para pemangku kepentingan disektor publik dan swasta (Niens dan McIlrath, 2010), dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Afrika: Pertimbangan dari Ghana dan Liberia (Quaynor, 2015). Penelitian lain memuat berbagai isu dan pendekatan yang kompleks terdilihat dari penelitian wacana kontemporer Kewarganegaraan (Abowitz dan Harnish, 2006), pendidikan global kewarganegaraan di universitas Yordania (Jarrar, 2012), belajar dari komunitas: Agenda untuk pendidikan kewarganegaraan (Ghosh, 2015), pembelajaran aktif untuk kewarganegaraan aktif: kewarganegaraan Demokrat dan belajar sepanjang hayat (Annette, 2009).

Ketiga membangun nasionalisme melalui pembelajaran budaya dan lingkungan sosial, adanya penelitian Civic dan

Pendidikan Intercultural: Sarana Pembangunan Masyarakat dan Perubahan Sikap (Sandu, 2015), mengembangkan model kewarganegaraan yang inklusif 'multikulturalisme Kelembagaan dan hubungan negara warga Negara (Kiwan, 2007), pentingnya pendidikan patriotik dan budaya masyarakat pemuda di Rusia: perspektif sosiologis (Omelchenko, et al., 2015). Pentingnya model pembelajaran PKn dikebangakan untuk mendorong perkembangan moral dan motivasi siswa dalam pendidikan moral: Sebuah studi di Singapura (Caroline, 2012), pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi kehidupan demokrasi proaktif dalam masyarakat pedesaan (Waterson dan Moffa, 2015), pembentukan pendidikan sipil dan patriotik pemuda di Kazakhstan (Tolen, et al., 2014), dan kewarganegaraan aktif: Pelayanan pendidikan dan pembelajaran (Birdwell, Scott dan Horley, 2013).

Keempat membangun nasionalisme generasi muda melalui peningkatan profesionalisme guru PKn, adanya penelitian menganalisis posisi prakiraan pendidikan kewarganegaraan di Inggris (Kisby, 2009). Penelitian lain dari aspek guru adanya penelitian sikap guru PKn peduli pada orang lain sebuah studi tentang konseptualisasi guru pendidikan kewarganegaraan (Patterson, Doppin, dan Misco, 2012), melanjutkan pendidikan guru PKn untuk mengajar Uni Eropa: Hasil PEB proyek (Jean, et al., 2015), pengembangan kerangka untuk pengetahuan guru pendidikan kewarganegaraan (Nogueira dan Moreira, 2012), kajian kompleks Universitas sebagai model kewarganegaraan aktif untuk pembangunan berkelanjutan: Studi kasus di Vietnam (Ngo dan Trinh, 2016), dan keterlibatan sipil sebagai guru masa depan (Sener, 2012).

Kelima membangun nasionalisme generasi muda untuk menjaga ketahanan tradisi kewarganegaraan, dapat dilihat dari studi integrasi Civic di Jerman, Inggris dan Denmark (Mouritsen, 2012), melihat kajian pendidikan dan hasil civic di Italia

memperkuat nasionalisme (Pietro dan Delprato, 2009), mengembangkan warga: Dampak peluang belajar civic Komitmen nasionalisme siswa untuk Partisipasi (Kahne dan Spote, 2008), peran kewarganegaraan dan pendidikan etika untuk pengembangan pemerintahan yang demokratis di Ethiopia: Prestasi dan tantangan (Bayeh, 2016), advokasi layanan pembelajaran untuk mengembangkan kewarganegaraan pada mahasiswa universitas di Afrika Selatan (Dorasamy dan Pillay, 2010).

Keenam membangun peran penting generasi muda dalam konteks nasionalisme adanya studi mengkaji pendidikan kewarganegaraan di Afrika: Pertimbangan dari Ghana dan Liberia (Quaynor, 2015), pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi muncul: Pelajaran dari pasca-komunis Polandia dan Rumania (Tobin, 2010), Galston pada kebajikan liberal dan tujuan pendidikan kewarganegaraan (Costa, 2006), masyarakat yang demokratis dan pendidikan moral (Gjorgjeva, 2010), hubungan antara keterbukaan dalam diskusi kelas dan pengetahuan siswa dalam pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan (Alivernini dan Manganelli, 2011), dan kajian kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan: Analisis wacana kritis Komisi Kepresidenan Laporan Zimbabwe (Sigauke, 2011).

B. Papua Nasionalisme Ganda

Penduduk Indonesia menduduki ribuan kepulauan di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, menganut berbagai agama, paham politik aneka aliran, namun karena mempunyai persamaan asal-



Gambar 9. Nasionalisme ganda orang Papua
Sumber: newsmetrotvnews.com

usul leluhur, persamaan nasib jaya serta derita dimasa lampau, persamaan perjuangan dalam membebaskan diri dari kungkungan penjajahan, mempunyai cita-cita kuat untuk hidup bersama dalam satu negara, maka segenap warga negara seluruh wilayah tanah air merupakan satu jiwa Indonesia dalam “Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetap satu juga (Bakry, 2009).

Nasionalisme Indonesia lahir dari kesadaran masyarakat untuk lepas dari penjajahan serta segala bentuk eksploitasi, diskriminasi mengganggu stabilitas politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan agama. Mengacu kesadaran, gagasan Nasionalisme dapat menjadi cita-cita pembangunan bangsa (Warka, 2011).⁴⁷

Nasionalisme ganda di Papua digambarkan bahwa bagaimana sebuah masyarakat masa depan, dibayangkan identitasnya oleh para propagandis nasionalisme bergumul antara identitas kepapuaan dengan keindonesiaan. Masa lalu bagi para propagandis nasionalisme lebih merupakan upaya untuk menambah percaya diri, bahwa masa depan bisa dibangun dengan puing-puing masa lalu. Singkatnya, nasionalisme dalam gerakan politik, lebih merupakan upaya untuk membangun identitas masa kini. Ekspresi nasionalisme umumnya lebih tertuju pada cita-cita politik akan masa depan, ketimbang upaya mencari-cari tali pusat ke masa lalu (Bernada, 2012).⁴⁸

Pada dasarnya, nasionalisme Indonesia berisi jiwa semangat anti-imprialisme serta antikapitalisme sebagai penyebabnya, sekaligus bersamaan dengan bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia. Munculnya cita-cita besar berkaitan pada masa depan bangsa Indonesia di kehidupan akan datang, yakni adanya komitmen, konsistensi untuk membangun masyarakat adil, makmur, sejahtera guna memungkinkan tercapainya cita-cita perdamaian dunia (Tjokroamidjojo, 1996).⁴⁹

Konsep persatuan ini mengandung makna dinamis, yaitu penuh semangat, tenaga sehingga cepat bergerak serta mudah menyesuaikan diri dengan keadaan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, bergerak menuju kesempurnaan, hasil persatuan adalah kesatuan

bangsa, berupa Nasionalisme Indonesia atau Nasionalisme Pancasila. Paham Nasionalisme di Indonesia tidak bersifat sempit menjurus kepada *rasialisme* (paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul), *jingoisme* (pandangan terlalu mengagung-agungkan kebesaran serta kekuasaan negeri sendiri), ataupun *chauvinisme* (patriotik yang berlebih-lebihan).

C. Nasionalisme di Dada Generasi Muda Daerah Perbatasan

Perbatasan merupakan wilayah yang rawan untuk terjadinya konflik, baik konflik kepentingan politik, ekonomi ataupun budaya, karena itu kesungguhan pemerintah dalam menjaga



Gambar 10. Perbatasan Indonesia Malaysia
Sumber: batasnegeri.com

perbatasan wilayahnya sangat diper-tanyakan, tidak hanya mengawasi agar wilayah tersebut di caplok oleh negara lain, tapi hal yang juga harus di perhatikan adalah warga yang berdomisili di perbatasan (Agung, 2014).⁵⁰

Perbatasan negara Indonesia tepatnya di pulau Kalimantan dengan negara Malaysia telah menimbulkan konflik diantara kedua negara ini, entah siapa yang seharusnya disalahkan dalam kecendrungan masyarakat di perbatasan ini yang secara sadar rela berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

Poin ini mefokus pembahasan nasionalisme di daerah perbatasan Indonesia. Perbatasan negara merupakan sebuah garis besar demarkasi antara dua negara berdaulat, pada awalnya perbatasan sebuah negara dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelum penduduk tinggal di wilayah tertentu tidak merasa perbedaan, bahkan tidak jarang berasal dari etnis yang sama.

Daerah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah propinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga) (Agung, 2014).

Kecemburuan sosial dan suka duka warga negara di perbatasan sangat menguji jiwa nasionalisme mereka. permasalahan terjadi diperbatasan dari segi ekonomi, pendidikan, politik, sumber daya manusia (SDM), minimnya pembangunan sangat lah menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat. Bahkan isu masyarakat mempunyai dua identitas yaitu Indonesia dan Malaysia (Muttakim, 2004).⁵¹

Daerah perbatasan sebagai daerah menjadi garis batas dengan negara lain, menjadi sentral terjadinya suatu interaksi, sebenarnya sudah dalam konteks aktivitas globalisasi, karena ada nya arus barang jasa, informasi begitu cepat. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang tidak hanya berdekatan secara geografis tapi memiliki keturunan ras yang sama yaitu ras Malayan mongoloid. Karena kesamaan inilah yang seharusnya hidup berdampingan secara rukun dan damai tapi ternodai dengan factor-faktor status yang sensitif (Liliweri, 2005).⁵²

Warga perbatasan kurangnya pembangunan yang dapat diakses oleh pemerintah, sehingga ada kesenjangan antara warga perbatasan dengan pemerintah, dalam hubungan malaysia dengan Indonesia sudah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan Indonesia melalui pernikahan, dan beberapa warga Indonesia menjadi warga Malaysia bahkan menjadi kepala desa di Malaysia (Ilahi, 2012).⁵³

Daerah perbatasan meliputi seluruh daerah sepanjang perbatasan dari pantai barat Kalimantan Barat sampai Pulau Sebatik (Kalimantan Utara). Daerah perbatasan adalah suatu jalur yang lebarnya oleh masing-masing pihak, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) mil, maksimal seluas Kecamatan di Indonesia (Agung, 2014).

Permasalahan akan muncul ketika fenomena pergantian kewarganegaraan ini dipertanyakan menggunakan semangat identitas dan nasionalisme masyarakat di Kalimantan itu sendiri, karena fenomena yang terjadi adalah banyaknya warga negara yang tinggal di perbatasan Kalimantan tersebut yang menggunkan fasilitas dari Malaysia bahkan rela pindah kewarganegaraan (Maliki, 2010).⁵⁴

Dari segi sosial banyak generasi muda putus sekolah karena ekonomi, akses sekolah sangat jauh, imprastruktur untuk kesehatan sangat kurang memadai kepada masyarakat karena terbatas untuk mendapatkan kesehatan serta pendidikan. Disisi lain berbagai permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan, kemiskinan, bahkan adanya pernikahan usia dini sehingga generasi muda banyak tidak mengenyamkan pendidikan seutuhnya (Tilaar, 2007).⁵⁵

Perbatasan merupakan tempat pelintasan batas penduduk, barang berbagai informasi. Konflik terjadi karena perbedaan pandangan serta kepentingan menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik ketahanan, keamanan, dari pendapat tersebut diatas dikemukakan bahwa daerah perbatasan merupakan suatu wilayah terjadinya arus barang jasa, informasi. Terjadinya konflik di daerah perbatasan itu karena dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan kepentingan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan (Kymlicka, 2013).⁵⁶

Setiap tahun masyarakat di perbatasan dibuai dengan adanya komitmen pemerintah untuk membangun perbatasan instansi terkait sudah merumuskan langkah dan program pembangunan di perbatasan masyarakat di perbatasan seolah berada pada puncak kemakmuran apabila program-program tersebut terlaksana tetapi hal ini sering terjegal dalam proses politik dan kepentingan pribadi dan kelompok sehingga program tersebut hanya beberapa persen saja yang dapat terlaksana dan dirasakan oleh masyarakat perbatasan.

Masyarakat perbatasan memang telah terbebas dari kolonialisme, konfontasi sehingga tidak lagi ada anggota keluarga mereka yang

meninggal akibat salah sasaran peluru musuh, tidak ada lagi pengungsian sembunyi di hutan belantara akan tetapi belum sepenuhnya terbebas dari aneka permasalahan dalam derajat tertentu mengurangi nikmat kemerdekaan yang seharusnya dikecap anak bangsa. Kemiskinan, ketertinggalan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan, adalah contoh-contoh permasalahan yang masih membutuhkan penanganan serius, sehingga ke depan masyarakat yang hidup diperbatasan dapat menikmati dengan kemerdekaan sejati (Natalis, 2000).⁵⁷

Warga perbatasan membuktikan nasionalisme di dada dengan mengibarkan seribu bendera merah putih, mendirikan tugu garuda di perbatasan, memfasilitasi pembiayaan obat gratis, memfasilitasi pendidikan, pembagian foto presiden serta melakukan seminar pemahaman wawasan kebangsaan (Syamsuddin, 2011).⁵⁸

Daftar Reference

- Abowitz, K. K dan Harnish, J. 2006. Contemporary discourses of citizenship. *Review of Educational Research Winter*, 76(4), p.653-690.
- AbulQaraya, B. 2015. The civic and cultural role of the Sheikh Zayed Grand Mosque. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, p.488-497.
- Agung, I. 2014. *Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah perbatasan*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Ali, A. S. 2009. *Negara Pancasila: Jalan kemaslahatan berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Alivernini, F dan Manganelli, S. 2011. Is there a relationship between openness in classroom discussion and students' knowledge in civic and citizenship education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 15, p.3441-3445.

- Amal, I dan Armawi, A. 1998. *Sumbangan ilmu sosial terhadap konsepsi ketahanan nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Annette, J. 2010. Active learning for active citizenship: Democratic citizenship and lifelong learning. *Education, Citizenship and Social Justice*, 4(2), p.149-160.
- Astiz, M. F. dan Mendez, G. 2006. Education for citizenship the Argentine case in comparison. *Education, Citizenship and Social Justice*, 1(2), p.175-200.
- Azhari, A. F. 2005. *Menemukan demokrasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bachtiar, H. W. 1992. *Wawasan kebangsaan indonesia: Gagasan dan pemikiran badan komunikasi penghayatan kesatuan bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat
- Bagir, Z. A. 2011. *Pluralisme kewargaan, Arah baru politik keragaman di Indonesia*. Bandung-Yogyakarta: Mizan dan CRCS
- Bakry, N. M. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bayeh, E., 2016. Role of civics and ethical education for the development of democratic governance in Ethiopia: Achievements and challenges. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 2, p.31-36.
- Benninga, J. S. 1991. *Moral, character, and civic education in the elementary school*. New York: Teacher College Press
- Bernada, M. 2012. *Nasionalisme ganda orang Papua*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Bhakti, I. N. 2008. *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar.

- Birdwell, J, Scott, R dan Horley, E., 2013. Active citizenship, education and service learning. *Education, Citizenship and Social Justice*, 8(2), p.185-199.
- Branson, S. M. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. 2008. *PKn dan masyarakat multikultural*. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI
- Caroline, K., 2012. Moral development and student motivation in moral education: A Singapore study. *Australian Journal of Education*, 56(1), p.83-101.
- Charlene, T., Islam and citizenship education in Singapore: Challenges and implications. *Education, citizenship and social justice*, 2(1), p.23-39.
- Cogan, J. J. dan Derricot, R. 1998. *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. London: Cogan Page
- Costa, M. V. 2006. Galston on liberal virtues and the aims of civic education. *Theory and Research in Education*, 4(3), p.275-289.
- Darmaputra, U. S. 1988. *Pancasila identitas dan modernitas: tinjauan etis dan budaya*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia
- Dorasamy, N dan Pillay, s. 2010. Advocating service learning for developing citizenship in university students in South Africa. *Industry & Higher Education*, 24(4), p.287-296.
- Edwards, J. dan Fogelman, K. (2000). *Citizenship education and cultural diversity*. London and New York: Falmer Press

- Elmubarok, Z. 2007. *Membumikan pendidikan nilai: Mengumpulkan yang terserak, menyambung yang terputus, dan menyatukan yang tercerai*. Bandung: Alfabeta
- Engle, S. H. dan Ochoa, A. S. 1988. *Education for democratic citizenship, decision making in the social studies*. New York: Teachers College Press.
- Evans, K. 2000. Beyond the work-related curriculum: Citizenship and learning after sixteen. *Politics, Education and Citizenship*. Vol. 6 London and New York: Falmer Press.
- Fatah, E. S. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Freddy, K. 2009. *Puspa ragam konsep dan isu kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press
- Gaffar, A. 1999. *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gayatri, I. H. 2008. "Rekonstruksi Aceh Baru," *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. ed.Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar
- Ghosh, S. 2015. Learning from community: Agenda for citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 10(1), 21-36.
- Gjorgjeva, E. P. 2010. Democratic society and moral education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2, p.5635-5640.
- Gutman, A. 2004. *Identity in Democracy*. USA: Princeton University Press
- Hamid, S. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah kebijakan, evaluasi dan saran*. Yogyakarta: UII Press
- Heater, D. 2004. *A Brief history of citizenship*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Hutchinson, J. 2005. *Nations as zone of conflict*. London: Sage Publication.
- Ilahi, M. T. 2012. *Nasionalisme dalam bingkai pluralitas bangsa: Paradigma pembangunan dan kemandirian bangsa*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Jarrar, A. G. 2012. Global citizenship education in Jordanian universities. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 47, p.1922-1926.
- Jerome, L. 2011. Service learning and active citizenship education in England. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(1), p.59-70.
- Kaelan. 2013. *Negara kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kahne, J. E dan Sporte, S. E. 2008. Developing citizens: The impact of civic learning opportunities on students' commitment to civic participation. *American Educational Research Journal*, 45(3), p.738-766.
- Kartodirjo, S. 1999. *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kawilarang, H. 2008. *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki* Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Kisby, B. 2009. Social capital and citizenship lessons in England: Analysing the presup positions of citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 4(1), p. 41-62.
- Kiwan, D. 2007. Developing a model of inclusive citizenship 'Institutional multiculturalism' and the citizen state relationship. *Theory and Research in Educatio*, 5(2), p.225-240.
- Kohn, H. 1971. *Nasionalisme arti dan sejarahnya* Jakarta: Pustaka Sardjana

- Kohn, H. 1984. *Nasionalisme, Arti Dan Sejarahnya*. Jakarta: Pembangunan.
- Kohn, H. 1984. *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Pembangunan.
- Kymlicka, W. 2003. *Kewarganegaraan multikultural*. Jakarta: LP3ES
- Lan, T. J. dan Manan, M. A. 2011. *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia: Sebuah tantangan*. Jakarta: Obor Indonesia
- Lijphart, A. 1997. *Democracy in Plural Societies*. New York : Vail Ballou Press
- Liliweri, A. 2005. *Prasangka dan konflik*. Yogyakarta: LKIS
- Listyarti, R. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Esis.
- Maliki, Z. 2010. *Sosiologi politik: Makna kekuasaan dan transformasi politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mandatory. 2005. *Politik perlawanan*. Yogyakarta: IRE
- Mangunhardjana, A. M. 1985. *Pendampingan Kaum Muda, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mann, J. A, Dymond, S. K, Bonati, M. L dan Neeper, L. S. 2005. Restrictive citizenship: Civic-oriented service-learning opportunities for all Students. *Journal of Experiential Education*, 38 (1), p.56-72.
- Martin, I. S. 2013. Teaching about religions and education in citizenship in France. *Education, Citizenship and Social Justice*, 8(2), p.151-164.
- McLuhan, M. 1968. *War and Peace in the Global Vilage*. USA: Bantam Book Inc.
- Mouritsen, P. 2012. The resilience of citizenship traditions: Civic integration in Germany, Great Britain and Denmark. *Ethnicities*, 13(1), p.86-109.

- Mutakin, A. 2004. *Dinamika masyarakat Indonesia*. Jakarta: Genesindo
- Nash, K. 2000. *Contemporary political sociology. globalization, politics and power*. Massachusetts: Blakwell Publise
- Natalis, D. 2000. *Evolusi nasionalisme dan sejarah*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Ngo, L. M dan Trinh, T. A. 2016. A University-City complex, a model for sustainable development: A case study in Vietnam. *Procedia Engineering*, 142, p. 92-99.
- Niens, U. dan McIlrath, L. 2010. Understandings of citizenship education in Northern Ireland and the Republic of Ireland: Public discourses among stakeholders in the public and private sectors. *Education, citizenship and social justice*. 5(1), p.73-87.
- Nogueira, F dan Moreira, A. 2012. A framework for civic education teachers' knowledge. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 47, p.1179 -1183.
- Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, p.1, 2008 (<http://www.asnlf.net/topmy.htm>).
- Nuraini, S. S. 2008. "POLRI dan Pengelolaan Keamanan Pasca MoU Helsinki," *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. ed.Ikrar Nusa Bhakti. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar.
- Nurhasim, M. 2008. *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar
- Oberle, M dan Forstmann, J. 2015. Continuing education of civics teachers for teaching the European Union: Results of the Jean

- Monnet project PEB. *Citizenship, Social and Economics Education*, 14(1), p.56-71.
- Omelchenko, D. Maximova, S. Avdeeva, G. Goncharova, N. Noyanzina, O dan Surtaeva, O. 2015. Patriotic education and civic culture of youth in Russia: sociological perspective, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 190, p.364-371.
- Parker, W. C. 1996. *Educating the democratic mind*. Albany, New York: State University of New York Press
- Patterson, N. Doppen, F. dan Misco, T. 2012. Beyond personally responsible: A study of teacher conceptualizations of citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(2), p.191-206.
- Pietro, G. D dan Delprato, M. 2009. Education and civic outcomes in Italy. *Public Finance Review*, 37(4), p.421-446.
- Quaynor, L. J. 2015. Researching citizenship education in Africa: Considerations from Ghana and Liberia. *Research in Comparative & International Education*, 10(1), p.120-134.
- Renan, E. 1990. "What is A Nation?" dalam *Nation and Narration*. Ed. Homi Bhabha, London: Routledge.
- Safria, T. 2008. *Suscessul Intelegence*. Yogyakarta: Arti Bumi Intara
- Sandu, O. N. 2015. Civic and intercultural education: A means for community development and attitude change. *SAGE*, 1-6
- Sanusi, A. 1999. Model Pendidikan Kewarganegaraan negara menghadapi perubahan dan gejolak sosial. Artikel dipresentasikan pada *Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung 16-17 Maret 1999
- Sapriya dan Winataputra, U. S. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung:

- Sapriya. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarga-negaraan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kemenag
- Sener, T. 2012. Civic engagement of future teachers. *Procedia Technology*, 1, p. 4-9.
- Shuayb, M. 2015. Human rights and peace education in the Lebanese civics textbooks. *Research in Comparative & International Education*, 10(1), p.135-150.
- Sigauke, A. T. 2011. Citizenship and citizenship education: a critical discourse analysis of the Zimbabwe presidential commission Report. *Education, Citizenship and Social Justice*, 6(1), p.69-86.
- Sneyder, L. L. 1954. *The meaning of nationalism*. New Brunswick-New Jersey> Rutgers University Press.
- Soedjatmoko. 1984. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Somantri, N. M. 2001. *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Somantri, N. M. 2001. *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Stoddard, L. 1966. *The new world of Islam: Dunia baru Islam*. Jakarta: Panitia Bk.Sukarno.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukarno, B. 2005. *Tinjauan filosofis tentang Pancasila sebagai falsafat*. Surakarta: UNS Press.

- Sumartana. 2001. *Pluralisme, konflik, dan pendidikan agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei
- Sunardi. 1997. *Teori ketahanan nasional*. Jakarta: Hastanas
- Suryadi, K. 2011. *Kompetensi sosial masyarakat majemuk: Modal sosial untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press dan Lab. PKn UPI.
- Suseno, F. M. 1997. *Mencari sosok demokrasi: Sebuah telaah filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Syamsuddin, A. 2011. *Api nasionalisme kaum muda peluang dan tantangan menumbuhkan semangat kebangsaan dikalangan muda Indonesia*. Jakarta: RMBOOKS
- Syamsudin, N. 1988. *Bung Karno Kenyataan Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Tilaar, H. A. R. 2007. *Mengindonesia etnisitas dan identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari perspektif ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tjokroamidjojo, B. 1996. *Dimensi rohani dan wawasan kebangsaan dalam pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Tobin, K. 2010. Civic education in emerging democracies: lessons from post-communist Poland and Romania. *Journal of Research in International Education*, 9(3), p.273-288.
- Tolen, Z. Tulenova, S. Assyltaeva, E. dan Aitymbetov, N. 2014. Formation of civil and patriotic education of youth in Kazakhstan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116 , p.4859-4863.
- Wahab, A. A dan Sapriya. 2011. *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta

- Warka, M. 2011. *Wawasan kebangsaan dalam NKRI*. Yogyakarta: Andi Offset
- Waterson, R. A. dan Moffa, E. D. 2015. Citizenship education for proactive democratic life in rural communities. *Education, Citizenship and Social Justice*, 11(3), p.213-230.
- Weis, P. 1979. *Nationality and Statelessness in International Law*. BRILL; ISBN 978-90-286-0329-5. p.29-61
- Winarno. 2007. *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah. 2007. *Civic Education*. Bandung: Pascasarjana UPI
- Yanuarti, S. 2008. “Pergeseran Peran TNI Pasca MoU Helsinki” *Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, ed.Ikrar Nusa Bhakti Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar.
- Yaqin, M. A. 2005. *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media
- Yoldaş, O. B. 2015. Civic education and learning democracy: their importance for political participation of young people. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 174, p. 544-549.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing
- Zamroni. 2002. *Kapita selekta Pendidikan Kewarganegaraan, Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas
- Zamroni. 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama

-
- ¹ Sukarno, B., 2005. *Tinjauan filosofis tentang Pancasila sebagai falsafat*. Surakarta: UNS Press.
 - ² Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
 - ³ Hamid, S. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah kebijakan, evaluasi dan saran*. Yogyakarta: UII Press
 - ⁴ Mandatory. 2005. *Politik perlawanan*. Yogyakarta: IRE
 - ⁵ Soedjatmoko. 1984. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
 - ⁶ Yaqin, M. A. 2005. *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media
 - ⁷ Sapriya. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kemenag
 - ⁸ Listyarti, R., 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Esis.
 - ⁹ Lijphart, A. 1997. *Democracy in Plural Societies*. New York : Vail Ballou Press
 - ¹⁰ Mangunhardjana, A.M., 1985, *Pendampingan Kaum Muda, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius
 - ¹¹ Gutman, A. 2004. *Identity in Democracy*. USA: Princeton University Press
 - ¹² Suryadi, K., 2011. *Kompetensi sosial masyarakat majemuk: Modal sosial untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press dan Lab. PKn UPI.
 - ¹³ Wahab, A. A dan Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
 - ¹⁴ Darmaputra, U. S. 1988. *Pancasila identitas dan modernitas: tinjauan etis dan budaya*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia
 - ¹⁵ Bachtiar, H. W. 1992. *Wawasan kebangsaan indonesia: Gagasan dan pemikiran badan komunikasi penghayatan kesatuan bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat
 - ¹⁶ Gaffar, A. 1999. *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
 - ¹⁷ Budimansyah, D. dan Suryadi, K. 2008. *PKn dan masyarakat multikultural*. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI
 - ¹⁸ Benninga, J. S. 1991. *Moral, character, and civic education in the elementary school*. New York: Teacher College Press
 - ¹⁹ Safria, T. 2008. *Suscessul Intelegence*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
 - ²⁰ Sumartana. 2001. *Pluralisme, konflik, dan pendidikan agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei
 - ²¹ Ali, A. S. 2009. *Negara Pancasila: Jalan kemaslahatan berbangsa*. Jakarta: LP3ES.
 - ²² Bagir, Z. A. 2011. *Pluralisme kewargaan, Arah baru politik keragaman di Indonesia*. Bandung-Yogyakarta: Mizan dan CRCS
 - ²³ Bakry, N. M. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
 - ²⁴ Freddy, K. 2009. *Puspa ragam konsep dan isu kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press
 - ²⁵ Winarno. 2007. *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Bumi Aksara
 - ²⁶ Zamroni. 2002. *Kapita selekta Pendidikan Kewarganegaraan, Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas
 - ²⁷ Sunardi. 1997. *Teori ketahanan nasional*. Jakarta: Hastanas
 - ²⁸ Fatah, E. S. 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
 - ²⁹ Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

-
- ³⁰ Engle, S. H. dan Ochoa, A. S. 1988. *Education for democratic citizenship, decision making in the social studies*. New York: Teachers College Press.
- ³¹ Azhari, A. F. 2005. *Menemukan demokrasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- ³² Edwards, J. dan Fogelman, K. (2000). *Citizenship education and cultural diversity*. London and New York: Falmer Press
- ³³ Cogan, J. J. dan Derricot, R. 1998. *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. London: Cogan Page
- ³⁴ Sanusi, A. 1999. Model Pendidikan Kewarganegaraan negara menghadapi perubahan dan gejolak sosial. Artikel dipresentasikan pada *Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung 16-17 Maret 1999
- ³⁵ Parker, W. C. (Ed.) 1996. *Educating the democratic mind*. Albany, New York: State University of New York Press
- ³⁶ Evans, K. 2000. Beyond the work-related curriculum: Citizenship and learning after sixteen. *Politics, Education and Citizenship*. Vol. 6 London and New York: Falmer Press.
- ³⁷ Somantri, N. M. 2001. *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- ³⁸ Winataputra, U. S. dan Budimansyah. 2007. *Civic Education*. Bandung: Pascasarjana UPI
- ³⁹ Sapriya dan Winataputra, U. S. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan PKn FPIPS UPI
- ⁴⁰ Branson, S. M. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS
- ⁴¹ Somantri, N. M. 2001. *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- ⁴² Zamroni. 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- ⁴³ Elmubarak, Z. 2007. *Membumikan pendidikan nilai: Mengumpulkan yang terserak, menyambung yang terputus, dan menyatukan yang tercerai*. Bandung: Alfabeta
- ⁴⁴ Amal, I dan Armawi, A. 1998. *Sumbangan ilmu sosial terhadap konsepsi ketahanan nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- ⁴⁵ Nash, K. 2000. *Contemporary political sociology. globalization, politics and power*. Massachusetts: Blakwell Publise
- ⁴⁶ Suseno, F. M. 1997. *Mencari sosok demokrasi: Sebuah telaah filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- ⁴⁷ Warka, M. 2011. *Wawasan kebangsaan dalam NKRI*. Yogyakarta: Andi Offset
- ⁴⁸ Bernada, M. 2012. *Nasionalisme ganda orang Papua*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- ⁴⁹ Tjokroamidjojo, B. 1996. *Dimensi rohani dan wawasan kebangsaan dalam pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta : Gramedia.
- ⁵⁰ Agung, I. 2014. *Pendidikan wawasan kebangsaan di daerah perbatasan*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- ⁵¹ Mutakin, A. 2004. *Dinamika masyarakat Indonesia*. Jakarta: Genesindo
- ⁵² Liliwari, A. 2005. *Prasangka dan konflik*. Yogyakarta: LKIS
- ⁵³ Ilahi, M. T. 2012. *Nasionalisme dalam bingkai pluralitas bangsa: Paradigma pembangunan dan kemandirian bangsa*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- ⁵⁴ Maliki, Z. 2010. *Sosiologi politik: Makna kekuasaan dan transformasi politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- ⁵⁵ Tilaar, H. A. R. 2007. *Mengindonesia etnisitas dan identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari perspektif ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- ⁵⁶ Kymlicka, W. 2003. *Kewarganegaraan multikultural*. Jakarta: LP3ES

-
- ⁵⁷ Natalis, D. 2000. *Evolusi nasionalisme dan sejarah*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- ⁵⁸ Syamsuddin, A. 2011. *Api nasionalisme kaum muda peluang dan tantangan menumbuhkan semangat kebangsaan dikalangan muda Indonesia*. Jakarta: RMBOOKS